

Enhancing the Role of Religious Education in Countering Violent Extremism in Indonesia – **CONVEY Indonesia**

Policy Brief Series

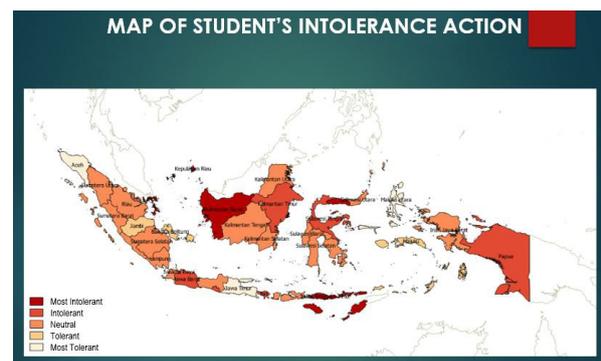
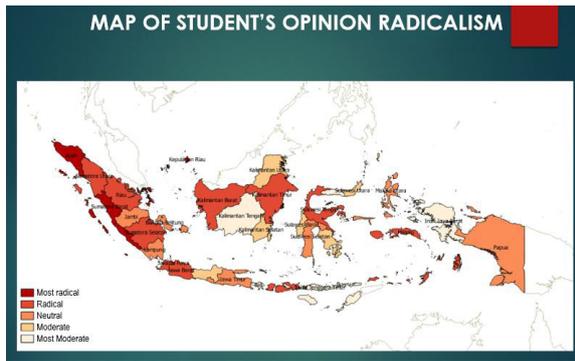
Issue 13 | Vol. 1 | 2018

Policy Brief series ini dibuat sebagai bagian dari proyek CONVEY Indonesia yang diselenggarakan oleh PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia, berkolaborasi langsung dengan tujuh lembaga riset.

CONVEY Indonesia dimaksudkan untuk membangun perdamaian di Indonesia dan mencegah ekstremisme bernuansa kekerasan dan radikalisme melalui serangkaian riset-survei, advokasi kebijakan, dan interaksi publik yang berbasis pada potensi pendidikan agama. Proyek CONVEY Indonesia menyentuh isu-isu toleransi, kebinekaan, dan nir-kekerasan di kalangan generasi muda.

Revitalisasi Pramuka & Karang Taruna dalam Rangka Menangkal Ekstrimisme-Kekerasan

Paramadina Institute of Ethics and Civilization (PIEC)
Universitas Paramadina



*Sumber PPIM dan CONVEY

Latar Belakang

Pramuka dan Karang Taruna memiliki sejarah panjang sebagai organisasi yang menaungi kegiatan kepemudaan. Keduanya memiliki kontribusi penting dalam menanamkan semangat nasionalisme dan kecintaan pada alam (Pramuka), serta semangat kreativitas dan produktivitas (Karang Taruna).

Namun sejak reformasi, Pramuka dan Karang Taruna mengalami kemunduran. Pramuka, misalnya, kurang diminati para siswa di sekolah. Hasil survei Setara Institute, Survei Toleransi Agama Siswa-Siswi SMA di Jakarta dan Bandung Raya, (Jakarta: Setara Institute, 2015) menemukan bahwa Pramuka hanya diminati oleh 11,2% siswa dan menempati posisi ke-3 di bawah olah raga dan kerohanian Islam (rohis).

Begitu juga Karang Taruna, organisasi Karang Taruna di daerah yang dulunya aktif sekarang menjadi kurang aktif dan bahkan ada yang benar-benar mati suri. Riset asesmen yang dilakukan PIEC (2017) menunjukkan ada dua faktor utama yang menyebabkan hal tersebut. Pertama, liberalisasi politik pasca reformasi memunculkan banyak partai politik dan semakin maraknya aktivitas politik dari pusat sampai daerah. Hal ini menyedot banyak sekali jumlah pemuda yang masuk ke dunia politik, terutama karena aktivitas politik yang masih dominan praktik-praktik transaksional atau apa yang kita kenal sebagai politik-uang (*money politics*). Kedua, semakin menjamurnya lembaga-lembaga non-pemerintah (LSM/ Lembaga Swadaya Masyarakat) dari level internasional,

nasional, regional sampai lokal dan dengan isu-isu yang semakin beragam, membuat Karang Taruna semakin terpinggirkan.

Kenyataan ini memprihatinkan di tengah semakin mundurnya eksistensi organisasi kepemudaan, pemahaman dan gerakan intoleransi serta radikalisme justru semakin banyak menghinggapi kegiatan anak-anak muda. Realitas ini terjadi karena anak-anak muda (remaja) tengah berada dalam fase transisi dari anak-anak ke dewasa. Mereka tengah mencari identitas jati-diri, suka akan tantangan dan petualangan, belum memiliki beban tanggungan, dan gemar menggunakan internet. Situasi ini membuat mereka berada dalam posisi yang rentan disusupi oleh pandangan yang bisa menyeret mereka pada ideologi dan aktivisme ekstrimisme-kekerasan.

Mengapa Kajian ini Penting

Mandat dan peran organisasi Pramuka dan Karang Taruna tergambar jelas dalam Undang-Undang yang mengatur tentang organisasi kepemudaan.

■ Undang-Undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Undang-Undang ini mengatur keberadaan Pramuka dari segi asas, fungsi dan tujuan, serta pendidikan kepramukaan. Meskipun secara kelembagaan, tugas, dan wewenang melekat dalam tanggungjawab pemerintah, namun hak dan kewajibannya memiliki otonomi yang kuat untuk melaksanakan pendidikan

kepemudaan bagi generasi muda, baik di sekolah maupun di luar sekolah.

- Permendikbud No. 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan mengatur secara eksplisit tentang pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib.

Sementara itu, payung hukum Karang Taruna terdapat pada,

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada pasal 13 dinyatakan Karang Taruna sebagai bagian dari struktur pemerintahan desa sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Permendagri No 5 Tahun 2007 pasal 1 yang mengatur pedoman penataan lembaga kemasyarakatan secara umum, termasuk Karang Taruna.
- Permensos No. 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Karang Taruna yang mengatur; (a) ketentuan umum, (b) asas dan tujuan, (c) kedudukan, tugas pokok dan fungsi, (d) keorganisasian, keanggotaan dan kepengurusan, (e) mekanisme kerja, (f) pembina Karang Taruna, (g) program kerja, (h) tanggung jawab dan wewenang, (i) penguatan dan pelantikan, (j) keuangan, (k) identitas dan lambang, dan (l) penutup.
- Permensos No 23 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna yang mengatur; (a) ketentuan umum, (b) kelembagaan, (c) pemberdayaan Karang Taruna, (d) pengelolaan sumber daya, (e) kewenangan, (f) koordinasi, (g) pendanaan, (h) pemantauan dan evaluasi, (i) pelaporan, (j) pembinaan dan pengawasan, (k) ketentuan penutup.

Dengan mandat seperti itu, peran organisasi Pramuka dan Karang Taruna secara kelembagaan diharapkan menjadi pusat kegiatan-kegiatan kepemudaan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Gerakan kepanduan (Pramuka) sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka pada 1945. Sejak awal berdirinya Pramuka memang dimaksudkan agar menjadi agen yang aktif menanamkan semangat nasionalisme kepada para anggotanya. Begitu juga pendirian Karang Taruna pada 26

September 1960. Pendirian Karang Taruna yang berbasis di desa/kelurahan bertujuan untuk menjadi wahana pelatihan bagi anak-anak muda dari pelbagai latar belakang agama, suku dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga persatuan dan kesatuan.

Karenanya, melemahnya daya tarik dan peran dari dua organisasi ini bagi pemuda mendorong PIEC Universitas Paramadina bekerjasama dengan PPIM UIN Jakarta melakukan asesmen tentang bagaimana upaya-upaya revitalisasi Pramuka dan Karang Taruna bisa dilakukan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain:

1. Riset asesmen tentang hambatan dan peluang pengembangan Pramuka & Karang Taruna melalui wawancara mendalam. Untuk Pramuka, wawancara dilakukan terhadap 100-an siswa anggota dan pembina Pramuka di SMA/SMK/MA di empat tempat yakni Bogor, Sukabumi, Serang dan Pandeglang. Untuk Karang Taruna, wawancara dilakukan terhadap 50 pemuda anggota pengurus dan pembina Karang Taruna di empat wilayah tersebut.
2. Survei daya tahan Pramuka & Karang Taruna terhadap ekstremisme-kekerasan. Untuk Pramuka, survei dilakukan terhadap 150 siswa peserta kemah di Bogor dan Pandeglang. Untuk Karang Taruna, survei dilakukan terhadap 70 pemuda peserta pelatihan di Sukabumi dan Serang.
3. *Focus Group Discussion* (FGD) tentang kebijakan terkait Pramuka & Karang Taruna; FGD Pramuka diikuti oleh 15 orang wakil dari Kemendikbud, Kemenag, Kemenpora, Kwarnas, perwakilan sekolah, Pramuka, tokoh muda dan lainnya. Sementara FGD Karang Taruna diikuti oleh 15 orang wakil dari Kemensos, Kemendes, Forum Karang Taruna Kabupaten/Kota, anggota dan pembina Karang Taruna, sosiolog dan lainnya.
4. FGD Pembuatan Modul Revitalisasi Pramuka

dan Karang Taruna yang dimaksudkan menjadi panduan materi menangkal radikalisme dan ekstremisme

5. Uji coba modul dalam bentuk kemah (Pramuka) dan pelatihan (Karang Taruna) dengan tema nasionalisme, kreativitas dan toleransi. Kemah dilaksanakan di Bogor dan Pandeglang yang diikuti oleh 150 anggota Pramuka dan pelatihan dilaksanakan di Serang dan Sukabumi yang diikuti oleh 70 pemuda Karang Taruna.
6. FGD Policy Brief dengan para pemangku kebijakan terkait Pramuka, Karang Taruna, dan CVE. Diikuti oleh 15 orang wakil dari Kemendikbud, Kemenag, Kemenpora, BNPT, Kemendes, Kemensos dan lainnya.

Temuan Hasil Penelitian

Pramuka

Hambatan:

Sejumlah faktor telah menjadi hambatan dalam pengembangan kegiatan Pramuka. Hambatan tersebut muncul dari kebijakan institusi sekolah, minat pelajar, dan kebijakan yang lebih makro (dari pemerintah). Sebagian besar pimpinan sekolah tidak menjadikan Pramuka sebagai prioritas dalam kegiatan ekstrakurikuler dan lebih fokus ke aspek akademik para siswa, akibatnya Pramuka tidak berkembang. Pelaksanaan kurikulum 2013 telah memaksa banyak sekolah menjadi *study-oriented* karena beban mata pelajaran yang banyak dan rumit khususnya menyangkut kompetensi dan standar nilai. Hambatan lain dari para pelajar sendiri, munculnya bentuk-bentuk baru kegiatan pemuda berbasis teknologi telah menimbulkan kesan kegiatan Pramuka ketinggalan jaman dan tidak menarik. Hampir 71 persen responden yang diwawancarai menyatakan bahwa belajar semaphore, sandi-sandi, dan lainnya dalam kegiatan kepramukaan tidak menarik. Sebaliknya, internet, media sosial, dan permainan di komputer telah menjadi kegiatan umum bagi pemuda di luar jam sekolah. Kegiatan Pramuka dianggap kurang menarik karena kesan yang timbul di kalangan

para siswa, bahwa Pramuka identik dengan semi-militer: kedisiplinan tinggi, kekerasan, seperti *verbal bullying* membentak-bentak dan lainnya. Ada juga hambatan yang berasal dari masih kurangnya jumlah pembina Pramuka di beberapa sekolah. Terutama pembina yang sudah lulus KMD/Kursus Mahir Dasar dan KML/Kursus Mahir Lanjutan. Idealnya, satu pembina mampu 150 sampai 200 anggota Pramuka. Tapi di beberapa sekolah yang jumlah siswanya di atas 1000 mereka hanya memiliki satu atau dua pembina yang sudah lulus KMD dan KPL. Akibatnya pembinaan pendidikan kepramukaan kurang berjalan sebagaimana mestinya. Hambatan lainnya adalah koordinasi yang kurang baik di kementerian terkait (Kemendikbud, Kemenag, dan Kemenpora) yang tercermin pada masih banyaknya tumpang tindih kebijakan dan juga implementasinya. Misalnya, anggota Pramuka terutama tingkat siaga dan penggalang berusia 7-15 tahun. Sementara gerakan Pramuka tidak berada di bawah Kemendikbud melainkan di bawah Kemenpora yang mengurus pemuda dan olahraga dimana pemuda adalah mereka yang berusia 17 tahun ke atas.

Peluang

Sampai saat ini Pramuka masih dipandang sebagai medium penanaman nilai-nilai nasionalisme paling efektif di kalangan pelajar. Ketika banyak pelajar mengalami kelunturan nasionalisme, gerakan Pramuka diharapkan bisa menjadi media yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini melalui penghayatan dan pengamalan Tri Satya dan Dasa Dharma sebagai pedoman dasar Pramuka. Pramuka juga mempunyai tradisi dan sejarah panjang yang telah ditorehkan sebagai organisasi dengan jumlah anggota yang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia; dari Sabang sampai Merauke, dari kota besar sampai ke pelosok desa dan pedalaman. Data menyebutkan bahwa anggota Pramuka jumlahnya sekarang lebih dari 20 juta; baik dari SD, SMP maupun SMA. Apalagi sejak tahun 2014 dimana Permendikbud menyatakan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib sehingga semua sekolah otomatis memiliki aktivitas pendidikan kepramukaan.

Dalam konteks inilah, penelitian ini menemukan

bahwa organisasi Pramuka mempunyai posisi strategis untuk mendiseminasi nilai-nilai anti kekerasan dan anti-ekstrimisme bagi pemuda, khususnya usia sekolah.

DAYA TAHAN PRAMUKA

Toleransi Agama

- Keimanan (KS0%, K5%, B65%, BS30%)
- Pengetahuan Agama (KS5%, K55%, B30%, BS10%)
- Ritual Agama (KS5%, K5%, B40%, BS50%)
- Pengalaman Agama (KS10%, K20%, B40%, BS30%)
- Konsekwensi Sosial (KS10%, K60%, B25%, BS5%)

Nasionalisme

- Kebanggaan (KS0%, K0%, B30%, BS 70%)
- Ketaatan (KS5%, K50%, B35%, BS 10%)
- Kesatuan (KS0%, K20%, B65%, BS15%)
- Kontribusi (KS5%, K55%, B25%, BS15%)
- Rela berkorban (KS5%, K15%, B40%, BS40%)

KS: Kurang Sekali; K: Kurang; B: Baik; BS: Baik Sekali.

Yang diberi warna merah masuk dalam kategori *early warning*

Berdasarkan tabel di atas, ada beberapa hal yang menjadi keunggulan Pramuka dalam meredam ekstremisme-kekerasan. Daya tahan Pramuka terhadap propaganda ideologi radikalisme dan ekstrimisme secara umum baik; rata-rata 67% menjawab B/Baik dan BS/Baik Sekali, dan hanya 33% yang menjawab K/Kurang dan KS/Kurang Sekali

Dalam hal toleransi agama aspek keimanan, ritual agama dan pengalaman agama juga cukup baik (rata-rata 85% menjawab Baik dan Baik Sekali). Para siswa merasa memiliki keyakinan yang kuat terhadap agama yang mereka anut, mereka juga rutin beribadah terutama sholat lima waktu, zakat dan puasa serta ibadah lain terutama shadaqah. Para siswa juga merasa bahwa pengalaman keagamaan mereka memberi pengaruh positif pada stabilitas emosi, pertimbangan perilaku dan penyesalan setelah melakukan kesalahan. Hanya pengetahuan agama (karena responden penelitian berasal dari SMA, SMK dan MA, maka hanya MA yang mengakui baik) dan konsekuensi sosial perlu diperbaiki (mereka bingung dengan batas-batas praktik toleransi). Rata-rata untuk dua hal itu hanya 35% siswa yang menjawab Baik dan Baik Sekali. Para siswa MA/Madrasah Aliyah mendapatkan pelajaran agama hampir tiap hari dan 5-6 hari selama seminggu sekolahnya dan secara komprehensif mulai dari *fiqih*, *tarikh-tasyri*,

qur'an-hadist, dan lainnya. Sementara para siswa SMA dan SMK hanya mendapatkan pelajaran agama secara umum dan hanya dua jam dalam seminggunya.

Sementara nasionalisme Pramuka secara umum baik terutama aspek kebanggaan, kesatuan dan rela berkorban (rata-rata 87% menjawab Baik dan Baik Sekali). Para siswa anggota Pramuka merasa memiliki kebanggaan sebagai warga negara Indonesia karena mereka menganggap bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, penduduknya banyak, beragam budaya, suku dan agama serta sekarang semakin maju secara ekonomi. Para siswa juga merasa bahwa persatuan sangat penting meski berbeda-beda suku, bahasa dan agamanya. Para siswa merasa rela berkorban untuk bangsanya, akan tetapi karena sekarang bukan jaman perang, mereka merasa cara berkorbannya adalah dengan belajar keras untuk memajukan bangsa. Aspek ketaatan belum baik (ini sebetulnya masalah umum masyarakat Indonesia) dan kontribusi (karena masih muda). Rata-rata untuk dua hal itu hanya 42% siswa yang menjawab Baik dan Baik Sekali. Para siswa merasa ada dilema ketika berada di ruang publik. Di satu sisi mereka diajarkan disiplin dan menaati peraturan di Pramuka, tapi di sisi lain mereka melihat masyarakat banyak yang tidak disiplin dan melanggar peraturan. Mereka kadang menegur tetapi tidak dihiraukan dan kadang mereka mengakui juga ikut-ikutan tidak disiplin dan melanggar peraturan.

Karang Taruna

Hambatan:

Nasib organisasi Karang Taruna juga tidak jauh berbeda. Sejumlah tantangan telah meringgirkan perannya sebagai organisasi pemuda di desa-desa. Secara internal, kebanyakan anggota, umumnya lebih dari 60% anggota Karang Taruna adalah pengangguran dan berpendidikan rendah (lulusan SMA dan bahkan ada yang hanya SMP dan SD). Hal ini berakibat pada rendahnya tingkat kreatifitas dan produktivitas Karang Taruna. Baik Karang Taruna di kota (Bogor dan Serang), maupun di desa (Sukabumi dan Pandeglang), presentasinya sama-sama tinggi yang pengangguran dan

berpendidikan rendah lebih dari 60%. Sementara secara eksternal, munculnya banyak NGO, ormas, dan partai politik sebagai alternatif yang lebih menarik minat pemuda, khususnya dari sisi finansial. Ini mengkonfirmasi cerita dibalik profil pemuda pelaku bom JW Marriot. Dani Dwi Permana (17 tahun) awalnya adalah anggota Karang Taruna di desanya di Bogor. Namun karena dari keluarga miskin dan kesulitan membayar biaya sekolah SMA-nya, Dani lebih memilih aktif sebagai marbot (penjaga musholla) di desanya dimana dia mendapatkan bantuan biaya sekolah dan sedikit uang saku. Lama-lama Dani meninggalkan sama sekali aktivitasnya di Karang Taruna. Dari kasus ini merefleksikan bahwa meskipun Karang Taruna adalah organisasi pemerintah, perhatian yang kurang turut menjadikan anggotanya kurang memiliki nilai nasionalisme yang kuat, sementara aspek lain seperti kemiskinan, ideologi ekstrimisme agama dan sejenisnya bisa menggerus nilai-nilai itu seperti pada kasus Dani.

Faktor utama yang juga menjadi masalah dalam upaya pengembangan Karang Taruna adalah minimnya dukungan desa. Kebanyakan Karang Taruna yang maju didukung oleh faktor kepemimpinan yang kuat dari kepala desanya. Ada beberapa kasus Karang Taruna maju namun kepala desanya kurang mendukung, kemudian pada periode kepemimpinan selanjutnya, sang ketua Karang Taruna terpilih menjadi kepala desa. Artinya, sebenarnya Karang Taruna memiliki posisi yang strategis di desa hanya terkadang masih kurang disadari. Masalah lainnya adalah kebijakan pemerintah yang mendukung mereka untuk bisa semakin kreatif dan produktif juga dianggap belum merata dan belum berkelanjutan. Karang Taruna terutama di pelosok desa merasa kurang mendapat cukup pembinaan dari Kemensos. Sementara Karang Taruna yang beberapa kali mendapat pembinaan menganggap kurang berkelanjutan.

Peluang dan Keunggulan:

Peluang dan keunggulan dari Karang Taruna tercermin dalam semangat gotong royong antar setiap anggota dalam berbagai kegiatan. Karang Taruna juga masih menjadi wadah kegiatan kepemudaan yang bisa mengurangi tingkat kriminalitas di lingkungan masyarakat desa dan

kelurahan. Ini terlihat dari kebiasaan koordinasi Karang Taruna dengan aparat kepolisian, sehingga pengawasan yang menyangkut urusan keamanan dan ketertiban di desa bisa dilaksanakan secara baik.

Posisi ini menjadikan Karang Taruna berpotensi sebagai organisasi kepemudaan untuk menangkal bahaya ekstremisme-kekerasan dan radikalisme di kalangan kaum muda. Berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh PIEC, Karang Taruna memiliki daya tahan terhadap pemikiran dan gerakan-gerakan ekstrem.

DAYA TAHAN KARANG TARUNA

Toleransi Agama

- **Keimanan (KS5%, K20%, B60%, BS15%)**
- **Pengetahuan Agama (KS10%, K50%, B25%, BS15%)**
- **Ritual Agama (KS0%, K20%, B45%, BS35%)**
- **Pengalaman Agama (KS0%, K15%, B70%, BS15%)**
- **Konsekwensi Sosial (KS5%, K55%, B15%, BS25%)**

Nasionalisme

- **Kebanggaan (KS10%, K45%, B35%, BS10%)**
- **Ketaatan (KS5%, K50%, B45%, BS5%)**
- **Kesatuan (KS5%, K25%, B35%, BS35%)**
- **Kontribusi (KS0%, K10%, B55%, BS35%)**
- **Rela berkorban (KS5%, K15%, B40%, BS40%)**

KS: kurang sekali; K: kurang; B: baik; BS: baik sekali.

Yang diberi warna merah masuk dalam kategori *early warning*

Berdasarkan tabel di atas, daya tahan Karang Taruna terhadap propaganda ideologi ekstrimisme secara umum baik, rata-rata 65% menjawab B/Baik dan Baik Sekali, dan hanya 35% yang menjawab K/Kurang dan KS/Kurang Sekali

Dalam hal toleransi agama aspek keimanan, ritual agama dan pengalaman agama cukup baik. Rata-rata 80% menjawab Baik dan Baik Sekali. Para anggota Karang Taruna merasa memiliki keyakinan yang kuat terhadap agama yang mereka anut, mereka juga rutin beribadah terutama sholat lima waktu, zakat dan puasa serta ibadah lain terutama sadaqah. Mereka juga merasa bahwa pengalaman keagamaan mereka memberi pengaruh positif pada stabilitas emosi, pertimbangan perilaku dan penyesalan setelah melakukan kesalahan. Hanya pengetahuan agama dan konsekuensi sosial perlu diperbaiki (sebagaimana pada Pramuka, mereka juga bingung tentang batas-batas praktik toleransi). Rata-rata untuk dua

hal itu hanya 40% siswa yang menjawab Baik dan Baik Sekali. Para anggota Karang Taruna umumnya tidak memiliki pengetahuan agama yang baik. Sedikit sekali dari mereka yang alumni madrasah, pesantren dan IAIN, persentasenya dibawah 30%. Kebanyakan adalah lulusan SMA, SMK, SMP dan SD. Mayoritas atau lebih dari 50% adalah lulusan SMA dan SMK.

Sementara nasionalisme Karang Taruna secara umum baik terutama aspek kesatuan, kontribusi dan rela berkorban. Rata-rata 80% menjawab Baik dan Baik Sekali. Para anggota Karang Taruna merasa bahwa persatuan sangat penting meski berbeda-beda suku, bahasa dan agamanya. Mereka merasa rela berkorban untuk bangsanya, termasuk untuk berperang melawan negara lain atau ikut kegiatan bela bangsa seperti wajib militer dan sejenisnya. Hanya aspek kebanggaan dan ketaatan masih harus diperbaiki. Rata-rata untuk dua hal itu hanya 47% yang menjawab Baik dan Baik Sekali. Para anggota Karang Taruna umumnya mengaku bangga menjadi bangsa Indonesia, karena itu bangsa yang besar, seperti sumber daya alam, kayak budaya dan suku bangsa. Akan tetapi mereka juga kecewa dengan modal kekayaan sumber daya alam dan budaya mereka yang masih miskin. Mereka juga tidak bangga karena korupsi di Indonesia masih tinggi dan terutama oleh para pejabat dan elit di Indonesia yang menurut mereka sebenarnya justru sudah kaya. Para anggota Karang Taruna merasa ada dilema ketika berada di ruang publik. Di satu sisi mereka sadar bahwa tidak disiplin dan tidak mentaati peraturan akan merusak ketertiban sosial, tapi di sisi lain mereka melihat masyarakat banyak yang tidak disiplin dan melanggar peraturan. Mereka kadang menegur tetapi tidak dihiraukan dan kadang mereka mengakui juga ikut-ikutan tidak disiplin dan melanggar peraturan.

Rekomendasi

Pramuka

1. Untuk kepala sekolah sebagai Majelis Pembimbing Gugus: harus memberikan dukungan penuh terhadap Pramuka. Dukungan tersebut dapat berupa himbauan, pengawasan, dukungan material, dukungan moril agar Pramuka di sekolah masing-masing semakin diminati para siswa dan semakin aktif dalam berkegiatan. Apalagi sesuai dengan Permendikbud, Pramuka

adalah ekstrakurikuler wajib. Kepala sekolah juga harus melibatkan para orang tua dan pihak-pihak lain terkait untuk memajukan Pramuka di sekolahnya. Jangan sampai karena alasan-alasan seperti fokus ke akademik para siswa, atau menganakemaskan ekstrakurikuler lain seperti olahraga, paskibra, rohis dan lainnya sehingga Pramuka kurang diperhatikan.

2. Untuk Kemendikbud: dalam rencana revisi permendikbud No 63 Tahun 2014 tentang Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib perlu menyertakan usulan agar Pendidikan Kepramukaan juga menjadi media sosialisasi CVE, khususnya melalui model blok (MPLS/ masa pengenalan lingkungan sekolah), selain model aktualisasi dan reguler. Di model blok sosialisasi lebih kepada pengetahuan umum tentang CVE (mengenal bahaya VE, ideologi dan aktivismenya dan sebagainya). Sementara di model aktualisasi dan reguler lebih secara khusus tentang bagaimana menangani VE di kalangan siswa, bagaimana mencegah VE, kampanye seperti apa dan sejenisnya. Revisi juga harus memperjelas OTK/Organisasi Tata Kelola implementasi Permen ini agar masalah kekurangan pembina Pramuka di sekolah seperti dikeluhkan dalam riset asesmen PIEC (2017) dan juga FGD Pramuka bisa diatasi.
3. Untuk BNPT & Kwarnas: agar menjadikan semangat anti-ekstremisme kekerasan menjadi salah satu krida (atau sekumpulan kecakapan khusus) di bawah saka (satuan karya) Bhayangkara yang sudah ada. Kecakapan khusus yang diperlukan antara lain; pengetahuan tentang VE baik ideologi maupun aktivitasnya, bagaimana mengidentifikasi awal VE menjangkiti para siswa, bagaimana penanganannya, bagaimana pencegahan atau kampanye agar VE tidak menjangkiti sekolah dan lainnya).
4. Untuk Kemendikbud dan Kemenpora; perlu diperjelas UU Kepramukaan apakah tetap dibawah Kemenpora atau Kemendikbud karena Pramuka selain berbasis sekolah juga usia mulai 7-25 tahun sementara Kemenpora dalam urusan pemuda usia mulai 17-45. Sebaiknya ada revisi UU Kepramukaan agar gerakan Pramuka berada di bawah Kemendikbud, tidak di bawah Kemenpora

Karang Taruna

1. Untuk kepala desa dan lurah: Karena secara kebijakan sudah diatur alokasi dana desa, masalah sejatinya muncul ketika implementasi kebijakan di lapangan. Kepala desa harus mendukung penuh kegiatan Karang Taruna di desa masing-masing terutama melalui alokasi dana desa dari tujuh sumber untuk program Karang Taruna yang bisa dimanfaatkan salah satunya untuk kegiatan CVE. Kegiatan bisa berupa sosialisasi, simulasi penanganan, pencegahan dan sejenisnya. Untuk kelurahan karena tidak mendapat dana desa, maka diharapkan mampu mendorong Karang Taruna memanfaatkan dana bantuan lain dari pemerintah (melalui Perda, Musrenbang dll) dan non-pemerintah seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan lainnya untuk kegiatan Karang Taruna baik seni dan olahraga, ketahanan nasional, usaha ekonomi kreatif, maupun usaha kesejahteraan sosial Termasuk kegiatan CVE seperti di aras.
2. Untuk BNPT: perlu memanfaatkan Karang Taruna secara optimal dalam kegiatan *Countering Violent Extremism* (CVE), perlu mengembangkan potensinya sebagai forum diseminasi nilai-nilai seperti nasionalismenya secara umum terjamin, keberadaan Karang Taruna di semua desa-kelurahan di Indonesia, dan langsung bersentuhan dengan kaum muda di wilayah masing-masing
3. Untuk Kemendes: revisi Permendes No 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Musyawarah Desa dan Permendes terkait lainnya sehingga nasib Karang Taruna tidak lagi tergantung pada Kepala Desa. Selama ini, maju atau mundurnya Karang Taruna banyak bergantung pada komitmen Kepala Desa sehingga yang dominan adalah pendekatan politis. Revisi Permendes ditujukan agar pendekatan teknokratis dan partisipatif bisa terimplementasi di lapangan.
4. Untuk Kemensos: Sesuai dengan Permensos 77 Tahun 2010 selaku yang bertanggung jawab atas pembinaan Karang Taruna harus memastikan bahwa program pembinaan menjangkau lebih banyak Karang Taruna terutama di pelosok, lebih berkelanjutan dan berorientasi pada pemanfaatan potensi lokal. Pembinaan perlu lebih diintensifkan lagi agar revitalisasi Karang Taruna bisa diwujudkan.



Enhancing the Role of Religious Education in Countering Violent Extremism in Indonesia

Gedung PPIM UIN Jakarta,
Jalan Kertamukti No. 5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419 Indonesia
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: pmu.convey@gmail.com | Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program of:



Empowered lives.
Resilient nations.